



PENGARUH DEMOKRASI LIBERAL TERHADAP STABILITAS POLITIK NEGARA INDONESIA TAHUN 1950-1959

KELLYNA NAJWA JULYANTIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK,
UNIVERSITAS PADJADJARAN

kellyna22001@mail.unpad.ac.id

Alamat: Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor

Korespondensi penulis: kellyna22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Indonesia's liberal democratic period (1950-1959) is an important part of the country's political history. During this time, the parliamentary system allowed for ideological pluralism, political freedom and public participation. However, the two main problems that hindered the government's performance were political instability and party disputes. The purpose of this article is to look at the political changes that occurred during the liberal democracy period, the problems faced, and how it impacted the progress of Indonesian democracy. This article shows that although liberal democracy had its weaknesses, this era provided valuable lessons about the importance of balance between political freedom and government stability. This is achieved by using a qualitative approach and historical method.*

Keywords: *Democracy, Liberal, Politics*

Abstrak. Masa demokrasi liberal Indonesia (1950–1959) adalah bagian penting dari sejarah politik negara. Pada masa itu, sistem parlementer yang digunakan memungkinkan pluralisme ideologi, kebebasan politik, dan partisipasi publik. Namun, dua masalah utama yang menghambat kinerja pemerintahan adalah instabilitas politik dan perselisihan partai. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat perubahan politik yang terjadi selama periode demokrasi liberal, masalah yang dihadapi, dan bagaimana hal itu berdampak pada kemajuan demokrasi Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi liberal memiliki kelemahan, era ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas pemerintahan. Ini dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode historis.

Kata kunci: Demokrasi, Liberal, Politik

LATAR BELAKANG

Periode demokrasi liberal adalah bagian penting dari sejarah demokrasi Indonesia. Meskipun demokrasi liberal telah diterima secara luas di banyak negara, implementasinya di Indonesia sangat berbeda. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dan menjadi negara merdeka pada tahun 1949, sistem Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan dan dibubarkan pada tahun 1950. Sejak saat itu, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan parlementer yang sebanding dengan yang ada di Barat. Nama periode ini adalah "Era Demokrasi Liberal". Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang menciptakan sistem

demokrasi liberal dari UUDS 1950. Ini terdiri dari sepuluh provinsi, masing-masing dengan hak otonomi.

Dalam sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi liberal, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara fungsi pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Perdana menteri memimpin kabinet atau dewan menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pada era demokrasi liberal, sistem multipartai memungkinkan banyak partai politik tumbuh dan berkembang. Partai-partai ini bersaing untuk memperoleh kekuasaan di bidang legislatif maupun eksekutif, yang mengakibatkan terjadinya tujuh kali pergantian kabinet dalam periode sekitar sembilan tahun. Persaingan antar partai ini menyebabkan situasi politik yang tidak stabil, karena masing-masing partai berusaha mengamankan kepentingan internalnya untuk mencapai puncak kekuasaan. Kondisi ini diperburuk oleh perbedaan ideologi yang ada di antara partai-partai tersebut.

Selama periode ini, Indonesia menghadapi politik yang rumit yang ditandai oleh krisis kabinet berulang, ketidakstabilan politik, dan konflik kepentingan antara berbagai partai politik dan ideologi. Tidak hanya sistem multipartai yang digunakan mencerminkan perbedaan pandangan dan keyakinan politik di Indonesia, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan politik yang signifikan. Tidak adanya koalisi yang solid menyebabkan pergantian kabinet hampir setiap tahun, yang menghambat proses pembuatan kebijakan dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk menangani masalah nasional. Demokrasi liberal, di sisi lain, memungkinkan kebebasan yang lebih besar untuk pers, komunikasi, dan organisasi. Hal ini mendorong aktivitas sosial-politik yang intens, di mana orang dari berbagai kelompok masyarakat berpartisipasi dalam diskusi publik tentang kebijakan negara yang akan datang. Namun, kebebasan ini juga menghadirkan tantangan, seperti polarisasi politik yang meningkat serta ketegangan di antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis.

Penelitian tentang perkembangan demokrasi liberal selama periode ini sangat penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Faktor-faktor dari tahun 1950–1959, seperti sistem parlementer, multipartai, dan peran pemikiran aktor politik utama, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara stabilitas politik dan model pemerintahan yang efektif.

KAJIAN TEORITIS

Dalam bahasa Yunani, "demos" artinya "rakyat", dan "kratos" atau "kratei" artinya "pemerintahan". Oleh karena itu, demokrasi liberal dapat diartikan sebagai pemerintahan yang didirikan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mengutamakan peran rakyat.

Demokrasi liberal, juga dikenal sebagai demokrasi konstitusional, adalah sistem politik yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas (baik melalui proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang kebijakan pemerintah, yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu yang tercantum dalam konstitusi. Penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau adalah orang pertama yang mengemukakan ide demokrasi liberal pada abad pencerahan. Selama perang dingin, istilah "demokrasi liberal" digunakan untuk membedakan komunisme versi Republik Rakyat. Saat ini, demokrasi konstitusional biasanya dibandingkan dengan demokrasi langsung atau partisipasi.

Sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada disebut sebagai demokrasi liberal. Negara-negara yang menggunakan konstitusi dapat Republik (Amerika Serikat, India, Perancis, dll.), monarki konstitusional (Inggris Raya, Spanyol, dll.), atau sistem semi presidensial.

METODE PENELITIAN

Salah satu cara kerja untuk memahami suatu objek penelitian secara sistematis dan mendalam dari praktik penelitian ilmiah adalah metode. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran yang optimal. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap kembali peristiwa masa lalu. Metode sejarah ialah sekumpulan prinsip atau aturan yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan data atau bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dan hasil hasilnya dalam bentuk tertulis. (Nugroho Notosusanto, 1984:11).

Seperti yang dinyatakan di atas, inti sarinya dapat ditemukan: metode sejarah digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian sejarah dan menilainya secara kritis sebelum menghasilkan tulisan.

Adapun cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; peneliti menggunakan teknik kajian pustaka, yang merupakan bentuk pengumpulan data yang bersumber dari telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lisan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data dengan tidak menggunakan data statistik akan tetapi penelitian menggunakan data dari kepustakaan dan internet, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam analisis data ini, upaya dilakukan untuk menganalisa data yang terkumpul, diolah, diklasifikasikan, dan dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan sumbernya. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), Penelitian ini menggunakan metode historis untuk menganalisis data kualitatif, deskriptif tentang Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal dari tahun 1949 hingga 1959.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, sistem kepartaian di Indonesia memiliki multipartai. Ini memungkinkan berkembangnya dan munculnya berbagai partai politik selama periode demokrasi liberal. Dengan menerapkan model demokrasi liberal parlementer Barat, penerapan sistem politik ini merupakan hasilnya. Ini akan memungkinkan partai politik untuk mengontrol pemerintahan. Pada periode ini, ada sekitar 30 partai yang aktif, dengan empat partai besar diantaranya Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI yang telah mendominasi politik dan memainkan peran penting dalam pemerintahan. Keempat partai ini memainkan peran penting dalam pemerintahan dan parlemen, membentuk kabinet dan menetapkan kebijakan. (Almusallam, 2022; Astara, 2020; Hosek, 2020; Khan, 2021; Nofre, 2019; Ravary, 2019b; Vaczi, 2021).

Pada awalnya, sistem politik multipartai menguntungkan karena memberi orang banyak kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai kanal politik. Kebebasan ini memberikan suara yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, sistem multipartai memungkinkan banyak pihak untuk dengan mudah membentuk partai politik baru. Partai-partai ini kadang-kadang tidak berfokus pada kepentingan rakyat, tetapi lebih pada agenda pribadi atau kelompok tertentu. Situasi ini menyebabkan persaingan yang semakin sengit dan tidak sehat di antara partai politik saat ini. Partai-partai ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan, dengan harapan dapat melaksanakan program atau visi mereka sendiri. Permusuhan ini semakin diperkeruh oleh perbedaan ideologi partai, yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan dan ketidakpastian di politik nasional.

Ketidakstabilan politik terjadi di Indonesia akibat persaingan yang tidak sehat dalam pemerintahan selama periode demokrasi liberal 1950–1959. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, tercatat tujuh kali kabinet berubah. Ini dimulai dengan Kabinet Natsir dari tahun 1950 hingga 1951, diikuti oleh Kabinet Sukiman dari tahun 1951 hingga 1952, Kabinet Wilopo dari tahun 1952 hingga 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari tahun 1953 hingga 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap dari tahun 1955 hingga 1956, dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari tahun 1956 hingga 1957. Pada akhir tahun 1956, stabilitas politik nasional mulai menurun karena banyaknya pergantian kabinet.

Dengan keadaan seperti ini, pergolakan daerah mulai muncul, diikuti oleh ketegangan di berbagai lembaga pemerintahan, termasuk angkatan bersenjata, sebagai tanggapan atas ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet yang dianggap lebih mengutamakan agenda partai atau kelompok politik tertentu daripada kepentingan rakyat menyebabkan gejolak politik. Ketidakefektifan ini, yang berasal dari perselisihan partai, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memperburuk situasi politik Indonesia saat itu.

2. Dampak dari Pergantian Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik

Berlangsungnya demokrasi liberal di Indonesia dari tahun 1950-1959 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selama itu pula sistem multipartai yang mendorong banyaknya partai politik yang muncul di Indonesia. Akan tetapi banyaknya partai politik yang ada di Indonesia pada masa demokrasi liberal cenderung lebih

mementingkan partainya sendiri dibandingkan kepentingan bangsa. Hal tersebut menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa itu, yang menyebabkan ketidakstabilan politik Indonesia.

Pada masa demokrasi liberal, ada kompetisi politik yang sangat sengit, di mana berbagai partai politik secara aktif bersaing untuk mendapatkan dukungan publik untuk memperoleh kursi di parlemen. Namun, kompetisi politik yang sengit seringkali menyebabkan ketegangan politik, karena partai politik bersaing dengan cara yang sangat agresif dan pemilihan umum dijadikan ajang untuk bersaing. Hal ini dapat mengancam stabilitas politik Indonesia pada saat itu. Serangkaian pergantian komposisi kabinet terjadi di tengah persaingan politik yang sengit. Berbagai partai politik berusaha memperoleh pengaruh dan tempat dalam pemerintahan, yang sering menyebabkan perubahan ini. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan oleh persaingan kekuasaan antar partai dan kelompok politik ini. Hal ini disebabkan oleh pergantian kabinet yang sering dan pergeseran kebijakan.

Polarisasi politik terjadi karena persaingan politik dan perebutan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi karena pemilih dan pendukung partai sering terbagi menjadi beberapa kubu yang bersaing untuk mendapatkan dukungan. Hasilnya adalah ketidakharmonisan dan konflik politik, yang pasti akan mengganggu stabilitas politik. Selama pembangunan demokrasi liberal Indonesia, tekanan politik dari berbagai negara datang dari luar, terutama selama perang dingin. Di Indonesia, Blok Barat dan Blok Timur bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Kebijakan internasional Indonesia dapat terpengaruh oleh tekanan dari luar serta menambah ketidakpastian politik dalam negeri.

Kebijakan pemerintah sering diubah oleh perubahan kebijakan, komposisi kabinet, dan pergantian pejabat. Hal ini dapat berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian karena orang mungkin harus beradaptasi dengan cepat terhadap kebijakan baru. Konflik regional dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat menyebabkan beberapa daerah melakukan pergolakan dan menginginkan otonomi daerah yang lebih besar karena mereka merasa tidak diwakili oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di tingkat lokal dan bahkan di tingkat nasional. Demokrasi liberal

merupakan periode yang cukup dinamis terhadap sejarah politik Indonesia, dimana terjadi transisi menuju demokrasi yang lebih baik sedang dilakukan.

KESIMPULAN

Masa demokrasi liberal (1950-1959) merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang diwarnai dengan dinamika pemerintahan parlementer dan sistem multipartai. Era ini memberikan ruang bagi pluralisme ideologi dan kebebasan politik, tetapi juga menghadapi tantangan besar terkait stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

Pergantian kabinet yang terjadi sebanyak tujuh kali selama sembilan tahun menunjukkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk membangun koalisi yang solid. Kondisi ini disebabkan oleh persaingan antar partai yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan nasional. Dampaknya adalah ketidakpastian kebijakan, polarisasi politik di masyarakat, serta ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah yang memicu konflik regional.

Meskipun demikian, periode ini memberikan pelajaran penting tentang kebebasan berekspresi, pertumbuhan partisipasi politik, dan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas pemerintahan. Demokrasi liberal menjadi refleksi awal dari perjuangan Indonesia untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, meskipun stabilitas politik baru dapat dicapai pada periode berikutnya di bawah pemerintahan Orde Baru.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada struktur politiknya, tetapi juga pada kemampuan aktor politik untuk membangun konsensus dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau partai. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan demokrasi di Indonesia pada masa-masa selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Gumbira, S. W., & Wiwoho, J. (2019). The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 6(2), 361-378. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/21237>
- Istiqomah, L., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2021). Orientasi Bernegara Republik Indonesia Periode 1959-1965. *Journal of Social Science Education*, 2(2). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jips/article/view/22146>
- Notosusanto, N., & Poesponegoro, M. D. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia VI*.
- Prabowo, G., & Gischa, S. (2020, October 28). Dinamika Politik Partai masa Demokrasi Liberal. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/28/155317169/dinamika-politik-partai-masa-demokrasi-liberal>
- Putri, L. R. (2024). Sukarno: Respon Terhadap Ketidakstabilan Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal 1956-1959. *Pubmedia social Sciences and Humanities*, 1(4).
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959. *Jurnal Historia*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>
- Silitonga, S. (2021). Indonesia 1945-2020: Demokrasi dan Civil Society. *Jurnal Sosial dan Sains*. <https://www.neliti.com/publications/538612/indonesia-1945-2020-demokrasi-dan-civil-society>
- Simbolon, R. (2018). Pengaruh Sistem multipartai Pada Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik Di Indonesia 1950-1959. *Undergraduate Thesis, UNIMED*. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/29583>
- Wijaya, A. N. (2023). Sistem Demokrasi Liberal 1950-1959: Sebuah Gagasan yang Gagal.